



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9488-9494

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Cantika Sarma Seicilia Silalahi¹, Najwa Adelia Siregar², Rafael Benediktus Manalu³, Sahira Annaba Lubis⁴,
Septriani Theresia Siagian⁵

¹²³⁴⁵Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi

¹cantikasilalahi416@gmail.com, ²Najwaadeliassiregar@gmail.com, ³mccword@gmail.com, ⁴sahiraalbs@gmail.com,
⁵septrianitsiagian05@gmail.com

Abstrak

Pengangguran terbuka hingga kini masih menjadi tantangan serius di dunia ketenagakerjaan Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah. Beragam program pembangunan yang telah dijalankan, baik yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi maupun penanggulangan kemiskinan, belum mampu secara konsisten menekan angka pengangguran di seluruh wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, menggunakan data sekunder cross section dari BPS yang diolah dengan regresi linear berganda metode OLS melalui EVIEWS. Sebelum estimasi dilakukan, model terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik meliputi uji normalitas Jarque-Bera, multikolinearitas dengan VIF, dan heteroskedastisitas metode Glejser dan seluruhnya dinyatakan terpenuhi. Kendati model lolos uji kelayakan, hasil uji parsial (uji t) justru memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) maupun tingkat kemiskinan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT secara individual. Hal serupa juga ditemukan pada uji simultan (uji F), di mana kedua variabel secara bersama-sama pun tidak terbukti memberikan pengaruh yang berarti. Kondisi ini diperkuat oleh nilai Adjusted R-squared yang hanya sebesar 3,54%, yang mengindikasikan bahwa variasi TPT antardaerah di Jawa Tengah jauh lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar model. Temuan ini memberikan pesan penting bahwa pendekatan makroekonomi semata tidak cukup untuk memahami dan mengendalikan dinamika pengangguran di tingkat kabupaten/kota. Dibutuhkan kajian yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, realisasi investasi, serta komposisi sektoral perekonomian daerah agar analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan relevan secara kebijakan.

Kata kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Regresi Linear Berganda, Jawa Tengah.

1. Latar Belakang

Pengangguran terbuka merupakan salah satu tantangan struktural yang terus membayangi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap tahun, jutaan lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan memasuki pasar tenaga kerja, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia tidak selalu bertumbuh dengan laju yang sepadan. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator yang paling diperhatikan dalam evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut BPS, TPT nasional pada Agustus 2023 tercatat sebesar 5,32%, turun dari 5,86% pada tahun sebelumnya, namun angka ini masih menyimpan kesenjangan yang cukup dalam antarprovinsi dan antarwilayah dalam satu provinsi.

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Dengan 35 kabupaten/kota yang tersebar dari kawasan pesisir utara hingga pegunungan di bagian selatan, provinsi ini menyimpan heterogenitas yang tinggi dalam hal kondisi ekonomi, struktur industri, dan kualitas sumber daya manusia. Data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 mencatat bahwa TPT antarwilayah di provinsi ini bervariasi cukup signifikan, mulai dari yang terendah di bawah 3% hingga yang tertinggi melampaui 8%. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam satu koridor kebijakan regional yang sama, masing-masing daerah memiliki dinamika ketenagakerjaan yang berbeda-beda dan tidak bisa dipotret hanya dari satu sudut pandang.

Perbedaan kondisi antarwilayah tersebut mendorong perlunya identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap TPT di tingkat kabupaten/kota. Dalam kerangka makroekonomi, dua variabel yang paling sering dikaitkan dengan pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Keduanya tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga menjadi fokus utama kebijakan pembangunan di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Oleh karena itu, mengkaji sejauh mana kedua variabel ini benar-benar memengaruhi TPT di level kabupaten/kota menjadi langkah yang penting sebelum kebijakan ketenagakerjaan dirancang lebih lanjut.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi seharusnya berbanding terbalik dengan pengangguran. Argumen ini berpijak pada Hukum Okun, yang pertama kali dikemukakan oleh Arthur Okun pada 1962. Okun berpendapat bahwa ketika perekonomian tumbuh melampaui batas kapasitas potensialnya, permintaan tenaga kerja akan meningkat sehingga mendorong penurunan angka pengangguran. Todaro dan Smith juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja baru yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan logika yang sama, kemiskinan pun diduga berkaitan erat dengan pengangguran karena seseorang yang tidak bekerja kehilangan sumber penghasilan utamanya dan berisiko jatuh ke dalam kemiskinan, begitu pula sebaliknya.

Namun ketika teori ini diuji secara empiris, hasilnya tidak selalu konsisten. Setyaputri dkk. yang meneliti 35 kabupaten/kota Jawa Tengah periode 2019–2023 justru menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Temuan ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut belum cukup kuat untuk menggerakkan pasar tenaga kerja secara berarti, atau dengan kata lain pertumbuhan berlangsung tanpa diikuti penyerapan tenaga kerja yang proporsional. Fenomena ini dalam literatur ekonomi dikenal sebagai *jobless growth*, yaitu kondisi di mana ekspansi output ekonomi tidak disertai penciptaan lapangan kerja yang memadai karena pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh sektor padat modal.

Di sisi lain, Vira Yuninda dan Rahayu yang mengkaji enam provinsi di Pulau Jawa periode 2012–2021 memperoleh hasil yang berbeda. Dalam penelitian mereka, PDRB terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, yang berarti Hukum Okun masih berlaku di level analisis tersebut. Putri dan Boedirochminarni juga menemukan bahwa pengangguran di Pulau Jawa lebih banyak dipengaruhi oleh variabel pendidikan, jumlah penduduk, dan upah minimum ketimbang semata-mata oleh pertumbuhan ekonomi. Adapun Darmawan dan Mifrahi, yang meneliti dinamika TPT di seluruh provinsi Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19, menyimpulkan bahwa variabel makro seperti upah minimum dan inflasi tidak berpengaruh signifikan, sementara laju pertumbuhan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru berpengaruh. Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran bersifat kontekstual dan tidak bisa digeneralisasi begitu saja lintas wilayah maupun lintas periode.

Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian di atas sebenarnya bisa dipahami jika memperhatikan perbedaan konteks yang melingkupinya. Studi yang menggunakan data panel dengan rentang waktu panjang, atau yang mengambil provinsi sebagai unit analisisnya, akan menangkap tren jangka panjang yang berbeda dari studi yang memotret kondisi satu tahun di tingkat kabupaten/kota. Data panel dengan dimensi waktu yang panjang cenderung meratakan fluktuasi dan lebih mudah menangkap pola hubungan antar variabel. Sebaliknya, data *cross section* satu tahun di tingkat kabupaten/kota merekam variasi antarwilayah yang jauh lebih heterogen dan tidak selalu mengikuti pola tren yang sama.

Celah inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Sejauh yang diketahui, belum banyak kajian yang secara khusus menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap TPT di seluruh 35 kabupaten/kota Jawa Tengah menggunakan data terbaru tahun 2023 dengan pendekatan *cross section*. Penggunaan data tahun 2023 juga relevan karena kondisi ketenagakerjaan pasca-pandemi Covid-19 mulai menunjukkan pemulihan, sehingga pola hubungan antarvariabel pada periode ini bisa jadi berbeda dari periode sebelumnya yang masih diwarnai dampak krisis kesehatan global tersebut. Dengan memfokuskan analisis pada satu tahun yang sama untuk seluruh wilayah, penelitian ini dapat mengisolasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dari efek tren waktu yang kerap menjadi pembaur dalam studi berbasis data panel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) yang diolah melalui perangkat lunak EViews. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih kontekstual mengenai dinamika pengangguran di level kabupaten/kota, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data, bukan sekadar asumsi teoritis semata.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berbentuk *cross section* yang mencakup seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Penggunaan data *cross section* dipilih karena penelitian ini berfokus pada perbandingan kondisi antarwilayah dalam satu periode waktu yang sama, tanpa membutuhkan dimensi waktu. Gujarati dan Porter (2013) menjelaskan bahwa data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah unit observasi baik individu, rumah tangga, perusahaan, maupun wilayah pada satu titik waktu tertentu, sehingga sesuai untuk keperluan analisis komparatif antarwilayah. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi BPS Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup Indikator Ketenagakerjaan, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, serta PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel, yakni satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (Y), yang diukur dari persentase jumlah pengangguran terhadap keseluruhan angkatan kerja per kabupaten/kota. Variabel independen pertama adalah Pertumbuhan Ekonomi (X₁), yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan per kabupaten/kota dalam satuan persen. Sementara itu, variabel independen kedua adalah Tingkat Kemiskinan (X₂), yang diukur berdasarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan per kabupaten/kota. Keseluruhan data ketiga variabel tersebut bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2023).

2.3 Model Analisis

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss pada awal abad ke-19 dan secara formal dirumuskan oleh Legendre (1805), dengan prinsip kerja meminimumkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi variabel dependen. Menurut Gujarati dan Porter (2013), OLS dipilih karena mampu menghasilkan estimator terbaik yang tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*) selama seluruh asumsi klasik terpenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam Teorema Gauss-Markov. Teorema tersebut menegaskan bahwa di antara semua estimator linear yang tidak bias, OLS menghasilkan estimator dengan varians paling kecil. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews, dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: Tingkat Pengangguran Terbuka (%);

β_0 : konstanta;

β_1 dan β_2 : koefisien regresi;

X₁: Pertumbuhan Ekonomi (%);

X₂: Tingkat Kemiskinan (%);

ε : error term.

2.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil regresi diinterpretasikan, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Ghazali (2016) menyatakan bahwa uji ini bertujuan memastikan model regresi yang dihasilkan bebas dari permasalahan yang dapat membuat estimator menjadi bias, tidak efisien, atau tidak konsisten, sehingga model benar-benar layak digunakan dalam pengujian hipotesis.

Uji Normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera yang dikembangkan oleh Jarque dan Bera (1987), dengan menguji apakah residual model berdistribusi normal berdasarkan nilai skewness dan kurtosis. H₀ diterima apabila nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05 (Gujarati & Porter, 2013).

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan Variance Inflation Factor (VIF) sesuai rekomendasi Gujarati dan Porter (2013) serta Ghazali (2016). VIF mengukur sejauh mana varians estimator meningkat akibat korelasi antarvariabel independen. Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai VIF tiap variabel < 10.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser (Glejser, 1969), yang bekerja dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen. Apabila probabilitas masing-masing variabel independen > 0,05, maka H₀ diterima dan model dinyatakan homoskedastis (Ghozali, 2016).

Uji Autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena data yang digunakan berbentuk *cross section*. Gujarati dan Porter (2013) serta Ghazali (2016) menegaskan bahwa uji autokorelasi hanya relevan untuk data *time series* atau panel data, sebab autokorelasi terjadi ketika residual suatu observasi berkorelasi dengan observasi lain dalam urutan waktu. Pada data *cross section*, setiap observasi antarkabupaten/kota bersifat independen secara struktural, sehingga pengujian ini tidak diperlukan.

2.5 Uji Hipotesis

Uji t (Parsial) digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Gujarati dan Porter (2013) menjelaskan bahwa statistik uji t diperoleh dari rasio koefisien estimasi terhadap standar errornya. H_1 diterima apabila nilai probabilitas $< 0,05$.

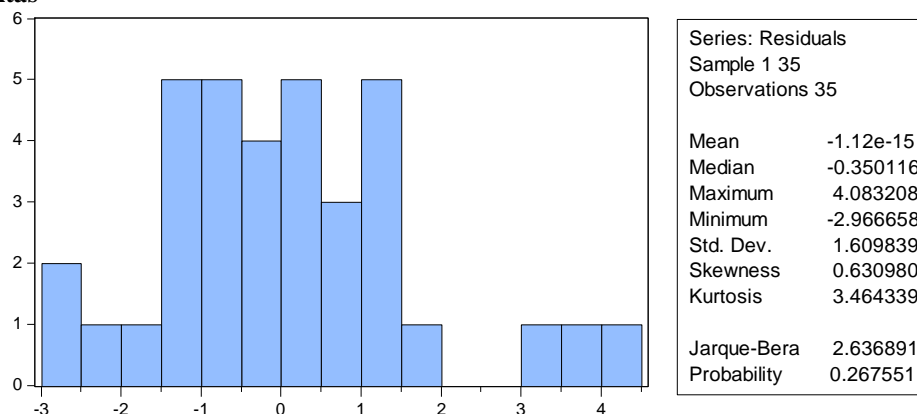
Uji F (Simultan) digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati dan Porter (2013), uji F pada dasarnya menilai apakah model regresi secara keseluruhan memiliki kemampuan penjelas yang bermakna secara statistik. H_1 diterima apabila probabilitas F-statistik $< 0,05$.

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Nilai Adjusted R^2 dipilih karena telah memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel, sehingga lebih tepat digunakan pada model dengan lebih dari satu variabel independen dibandingkan R^2 biasa (Gujarati & Porter, 2013).

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Hasil

Uji Normalitas



Hasil uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,267551 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 03/18/26 Time: 22:32
 Sample: 1 35
 Included observations: 35

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.145894	65.40863	NA
X1	0.158067	51.87857	1.004375
X2	0.007632	11.49006	1.004375

Hasil uji multikolinearitas melalui pendekatan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa nilai Centered VIF variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 1,004375 yang berada jauh di bawah nilai kritis 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Test Equation:
 Dependent Variable: ARESID
 Method: Least Squares
 Date: 03/18/26 Time: 22:33
 Sample: 1 35
 Included observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.405819	1.397631	-0.290362	0.7734
X1	0.220896	0.244953	0.901787	0.3739
X2	0.050487	0.053823	0.938003	0.3553

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel X1 sebesar 0,3739 dan X2 sebesar 0,3553, keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heterokedastisitas atau dengan kata lain terjadi homokedastisitas.

Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.834907	2.268456	0.368051	0.7153
X1	0.619030	0.397577	1.557007	0.1293
X2	0.088007	0.087359	1.007410	0.3213

- Variabel X1 memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1293 > 0,05, sehingga X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- Variabel X2 memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3213 > 0,05, sehingga X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Uji F (Simultan)

R-squared	0.092102	Mean dependent var	4.864857
Adjusted R-squared	0.035358	S.D. dependent var	1.689522
S.E. of regression	1.659384	Akaike info criterion	3.932586
Sum squared resid	88.11378	Schwarz criterion	4.065902
Log likelihood	-65.82026	Hannan-Quinn criter.	3.978607
F-statistic	1.623119	Durbin-Watson stat	0.986007
Prob(F-statistic)	0.213106		

Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,213106 > 0,05, sehingga variabel X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.092102	Mean dependent var	4.864857
Adjusted R-squared	0.035358	S.D. dependent var	1.689522
S.E. of regression	1.659384	Akaike info criterion	3.932586
Sum squared resid	88.11378	Schwarz criterion	4.065902
Log likelihood	-65.82026	Hannan-Quinn criter.	3.978607
F-statistic	1.623119	Durbin-Watson stat	0.986007
Prob(F-statistic)	0.213106		

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,035358 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 hanya mampu menjelaskan variasi variabel Y sebesar 3,53%, sedangkan sisanya 96,47% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai ini tergolong rendah, namun hal tersebut tetap sah dalam sebuah penelitian karena rendahnya nilai R² tidak serta merta menggugurkan validitas penelitian, melainkan mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang

mempengaruhi variabel Y yang belum dimasukkan dalam model, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gujarati (2003) bahwa nilai R^2 yang rendah pada data *cross section* adalah hal yang wajar dan dapat diterima secara ilmiah.

Uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena data yang digunakan merupakan data *cross section*. Hal ini sejalan dengan pendapat Gujarati (2003) dan Ghozali (2018) yang menyatakan bahwa uji autokorelasi hanya diperlukan pada data time series atau data panel yang memiliki dimensi waktu, sedangkan pada data *cross section* antar observasi diasumsikan independen satu sama lain sehingga pengujian autokorelasi tidak relevan untuk diterapkan.

3.2 Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap TPT

Ketidaksignifikanan pertumbuhan ekonomi terhadap TPT di Jawa Tengah tahun 2023 mencerminkan bahwa ekspansi PDRB di tingkat kabupaten/kota tidak otomatis menggerakkan pasar kerja secara proporsional. Kondisi ini berkaitan erat dengan fenomena *jobless growth*, yaitu pertumbuhan yang bertumpu pada sektor-sektor padat modal sehingga penciptaan lapangan kerja baru berlangsung sangat terbatas. Ketika laju pertumbuhan angkatan kerja baru melampaui kapasitas serap pasar kerja, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan pengangguran menjadi tidak terdeteksi secara statistik. Temuan ini selaras dengan Setyaputri et al. (2025) yang pada periode dan wilayah yang hampir identik juga tidak menemukan pengaruh signifikan PDRB terhadap pengangguran di Jawa Tengah. Sebaliknya, penelitian Vira Yuninda dan Rahayu (2024) di level provinsi menemukan hubungan yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa Hukum Okun lebih terlihat pada agregasi data yang lebih luas dan jangka panjang dibandingkan pada data *cross section* satu tahun di tingkat kabupaten/kota.

Tingkat Kemiskinan Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap TPT

Tidak signifikannya kemiskinan terhadap TPT dapat dipahami dari karakteristik perilaku ketenagakerjaan penduduk miskin di Jawa Tengah. Karena ketiadaan tabungan dan minimnya jaring pengaman sosial, penduduk miskin pada umumnya tidak berada dalam posisi untuk menunda pekerjaan atau selektif dalam memilih pekerjaan. Mereka cenderung menerima pekerjaan apa pun yang tersedia, termasuk di sektor informal yang tidak tercatat dalam statistik pengangguran formal. Akibatnya, meski suatu daerah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, angka TPT-nya belum tentu turut meningkat karena penduduk miskin telah "*menyerap dirinya sendiri*" ke dalam pekerjaan-pekerjaan informal berproduktivitas rendah. Darmawan dan Mifrahi (2022) memberikan konteks yang relevan bahwa variabel-variabel makro tidak selalu mampu menangkap dinamika pengangguran secara memadai, dan pengendalian TPT lebih efektif melalui intervensi kebijakan di level mikro.

Rendahnya Nilai Adjusted R^2 (3,54%)

Nilai Adjusted R^2 sebesar 3,54% bukan berarti penelitian ini tidak valid, melainkan memberikan informasi penting: TPT antarwilayah di Jawa Tengah sangat bervariasi dan tidak cukup dijelaskan hanya oleh dua variabel makroekonomi. Gujarati dan Porter (2013) menegaskan bahwa pada data *cross section*, nilai R^2 yang rendah adalah hal yang lazim secara metodologis. Berbeda dengan data time series yang lazimnya menghasilkan R^2 tinggi karena adanya tren bersama, data *cross section* justru merekam heterogenitas antardaerah yang sangat besar mulai dari perbedaan struktur industri, kualitas sumber daya manusia, kondisi investasi, hingga dinamika pasar tenaga kerja lokal yang masing-masing bersifat unik. Putri dan Boedirochminarni (2025) menunjukkan bahwa pengangguran di Pulau Jawa dipengaruhi oleh pendidikan, jumlah penduduk, dan upah minimum variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, rendahnya R^2 ini secara akademis menjadi dasar rekomendasi bagi penelitian berikutnya untuk membangun model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel seperti IPM, upah minimum kabupaten/kota (UMK), realisasi investasi, maupun komposisi sektoral perekonomian daerah..

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan pendekatan OLS terhadap data *cross section* 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang patut dicermati. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil ini mengindikasikan bahwa ekspansi ekonomi yang terjadi di berbagai kabupaten/kota belum cukup kuat dalam mendorong penyerapan tenaga kerja secara merata, yang kemungkinan besar berkaitan dengan karakteristik pertumbuhan yang lebih bertumpu pada sektor padat modal daripada sektor padat karya. Kedua, tingkat kemiskinan juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap TPT secara parsial. Kondisi ini dapat dipahami dari perilaku ketenagakerjaan penduduk miskin yang, karena keterbatasan ekonomi, cenderung menerima pekerjaan apa pun yang tersedia meski di sektor informal berproduktivitas rendah. Akibatnya, mereka tidak dihitung sebagai pengangguran terbuka meskipun secara substantif berada dalam kondisi ketenagakerjaan yang tidak layak. Ketiga, secara simultan kedua variabel juga

tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT, dengan nilai Adjusted R² hanya sebesar 3,54%. Angka ini tidak berarti penelitian ini tidak valid, melainkan menegaskan bahwa TPT di tingkat kabupaten/kota merupakan fenomena yang sangat heterogen dan tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan dua variabel makroekonomi. Nilai R² yang rendah pada data *cross section* adalah hal yang dapat diterima secara metodologis karena data jenis ini memang merekam keragaman antarunit observasi yang sangat besar. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kajian selanjutnya memperluas model dengan memasukkan variabel-variabel yang lebih mencerminkan karakteristik struktural wilayah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum kabupaten/kota (UMK), realisasi investasi daerah, serta komposisi sektoral perekonomian. Bagi pengambil kebijakan, temuan ini menjadi pengingat bahwa upaya menekan pengangguran tidak cukup hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro, melainkan perlu diiringi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tertarget di level mikro, seperti pelatihan vokasional, perluasan akses program perlindungan sosial, dan pengembangan sektor usaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih inklusif.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2023*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
2. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Indikator ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2023*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Produk domestik regional bruto kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 2023*. BPS Provinsi Jawa Tengah.
4. Darmawan, A. S., & Mifrahi, M. N. (2022). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 111–118. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art11>.
5. Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Glejser, H. (1969). A new test for heteroscedasticity. *Journal of the American Statistical Association*, 64(325), 316–323. <https://doi.org/10.2307/2283741>.
7. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika (Edisi 5)*. Salemba Empat.
8. Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163–172. <https://doi.org/10.2307/1403192>.
9. Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics (10th ed.)*. Worth Publishers.
10. Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its measurement and significance. *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association*, 98–104.
11. Putri, W. A. A., & Boedirochminarni, A. (2025). Dinamika pengangguran terbuka di Provinsi Pulau Jawa: Analisis data panel. *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(2). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.377>.
12. Setyaputri, N. A., Nurfiana, W., Insani, A. N., Nihayah, D. M., & Nuryana, I. (2025). Pengaruh PDRB, upah minimum, jumlah penduduk terhadap pengangguran kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019–2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(2), 127–137. <https://doi.org/10.26740/jupe.v13n2.p127-137>.
13. Sukirno, S. (2013). *Makro ekonomi: Teori pengantar (Edisi 3)*. Rajawali Pers.
14. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development (12th ed.)*. Pearson Education.
15. Vira Yuninda, B., & Rahayu, A. (2024). Determinan tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa tahun 2012–2021. *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 48–56. <https://doi.org/10.33005/jdep.v7i2.465>.